

KOTA BUKITTINGGI 1888-1942 : STUDI TENTANG PERALIHAN PEMILIKAN TANAH DAN PERUBAHAN EKOLOGI KOTA

Zulqayyim, Sabar, Fatchurrahman

ABSTRACT

This historical study, Bukittinggi in colonial period, is interested to be searched, because during this time the structure of town had been formed and also the system of the private owner land and ecology was changed. Firstly the system of the own was adressed to the property of a clan, but later most of the leved had been owned by the dutch colonial through, borrowing, puchasing, and clainning as their own. Beside that, some town facility such as government office building, garnizon area, market place are also had been built by the colonial, and it was effected from rural area to be urban.

1. PENDAHULUAN

Studi sejarah perkotaan mulai banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan sejak satu dasawarsa terakhir.¹⁾ Selain menjelaskan genesis, dinamika, kecenderungan, dan karakteristik sebuah kota, studi sejarah perkotaan juga ditujukan untuk memahami berbagai persoalan yang muncul di perkotaan dewasa ini.²⁾ Dengan demikian, darinya akan didapatkan pemahaman terhadap keberadaan sebuah kota dan sekaligus masukan bagi pembangunan kota pada masa mendatang.

Akan tetapi, kalangan selarawan lebih banyak memberikan perhatiannya terhadap kota-kota pelabuhan (pantai) daripada kota pedalaman (dataran tinggi).³⁾ Padahal kota dataran tinggi tidak kalah pentingnya dibanding kota pantai. Bahkan dalam beberapa kasus memperlihatkan bahwa kota pelabuhan relatif amat terkait dengan kota pedalamannya, seperti antara kota Padang dan Bukittinggi. Dalam konteks ini pulalah kiranya penting mengkaji kota Bukittinggi yang terletak di daerah Dataran Tinggi Sumatera Barat.

Penelitian ini difokuskan pada masalah peralihan pemilikan tanah dan perkembangan ekologi kota Bukittinggi tahun 1888-1942. Topik ini menarik diteliti karena pada masa penjajahan Belanda ini terbentuk dan berkembangnya struktur sosial dan fisik kota Bukittinggi. Sementara pada masa pendudukan Jepang dan pasca-Kemerdekaan kota Bukittinggi relatif tidak banyak mengalami perkembangan. Bahkan, Mochtar Naim mensinyalirnya bahwa kota Bukittinggi mengalami proses involusi, karena arus urbanisasi dan diferensiasi sosial berjalan relatif sangat lambat.⁴⁾ Oleh karena itu, penelusuran pertumbuhan dan perkembangan kota Bukittinggi pada periode ini, pada gilirannya akan

¹⁾ P.J.M. Nas (ed.), *Issues in Urban Development : Case Studies from Indonesia* (Den Haag: Leiden University, 1995), hlm. 246-293.

²⁾ Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial*, 1888 (Jakarta: Bhratara, 1977), hlm. 1-3.

³⁾ P.J.M. Nas, *Loc. cit.*

⁴⁾ Mochtar Naim, "Perkembangan Kota-kota di Sumatera Barat" dalam *Prisma* no. 3 Tahun II, hlm. 58-62.

menjelaskan dinamika kota Bukittinggi, baik sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan pendidikan maupun sebagai salah satu pusat pergerakan nasional di Sumatera Barat.

Tahun 1888 dijadikan "awal" kajian ini karena pada tahun 188 itu untuk pertama kalinya batas-batas Bukittinggi ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penetapan wilayah Bukittinggi ini berimplikasi terhadap peralihan pemilikan tanah dan pengembangan ekologi kota Bukittinggi. Pemerintah Hindia Belanda secara sepihak mengklaim wilayah Bukittinggi, yang semula termasuk ke dalam wilayah kekuasaannya.⁵⁾ Selanjutnya, di Bukittinggi dibangun berbagai fasilitas kota, seperti birokrasi, transportasi, sekolah, *loods-loods* dan toko-toko, dan rekreasi, yang merubah ekologi kota Bukittinggi. Lingkungan pedesaan secara perlahan berkembang menjadi lingkungan perkotaan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Agar dapat dilakukan penelitian sejarah secara sistematis, maka digunakan metode penelitian historis. Ada empat langkah pokok dalam jenis penelitian historis ini, yaitu (1) tahap heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber, baik berupa arsip, dokumen, artikel, peta, foto atau buku-buku yang berisi laporan, baik dari pejabat-pejabat pemerintah maupun berupa laporan perjalanan. Untuk keperluan ini dilakukan penelitian kearsipan dan perpustakaan di Jakarta (Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional), Padang (Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Andalas dan Genta Budaya), dan Padangpanjang (Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau).

(2) Tahap kritik sumber yaitu ekstern dan intern. Setelah sumber-sumber tersebut diperoleh, kemudian dikritik secara ekstern untuk menentukan otentisitasnya. Adapun kritik intern digunakan untuk menentukan kredibilitasnya, sehingga darinya akan didapatkan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(3) Interpretasi atau sintesa untuk menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang telah diperoleh dari berbagai sumber itu.
(4) Penulisan. Pada tahap terakhir ini pelbagai fakta yang lepas satu dengan

⁵⁾ Muhammad Hadjerat, *Sedjarah Nagari Kurai V Dierong Serta Pemerintahannya. Pasar. dan Kota Bukittinggi*. (Bukittinggi : Tsamaratul Ichwan, 1947).

lainnya dirangkaikan dalam suatu kesatuan narasi yang harmonis dan masuk akal.

Melalui pendekatan historis/diakronis ini diharapkan akan dihasilkan sebuah eksplanasi historis yang mampu mengungkapkan genesis, kausalitas dan segi-segi prosesual dari peralihan kepemilikan tanah dan perkembangan ekologis kota Bukittinggi (1888-1942). Selain itu, untuk menjelaskan kompleksitas fenomena sejarahnya itu dilakukan pula pendekatan struktural/sinkronis. Hal ini penting dilakukan untuk dapat menganalisis aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Konsekwensinya adalah dalam studi ini juga digunakan konsep-konsep ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi dan antropologi, model ini disamping berusaha menjelaskan kejadian sejarah melalui asal-usulnya, juga selalu mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu kejadian terjadi pada waktu tertentu. Akhirnya dalam membuat sintesa sejarah diupayakan menyangkut hal-hal tertentu dalam gambaran genetis (serial), vertikal atau kausal (diakronis), dan horizontal (sinkronis).

3. ASAL-USUL NAMA BUKITTINGGI

Bukittinggi berasal kata bukit nan tatinggi (bukit yang tertinggi).⁶⁾ Bukit yang dimaksud itu bernama Bukik Kubangan Kabau yang tingginya 936 meter di atas permukaan laut.⁷⁾ Bukit ini merupakan salah satu bukit yang tertinggi di antara 27 bukit yang terdapat dalam wilayah hukum adat Nagari Kurai V Jorong, yang terletak di Bagian Selatan dari bukit-bukit itu. Bukik ini berada di bagian selatan dan terletak cukup strategis, yaitu menghadap ke Lembah Dataran Tinggi Agam dan Gunung Merapi. Oleh karena itu pulalah kiranya para penghulu Nagari Kurai V Jorong memilihnya sebagai tempat untuk mengadakan musyawarah sekitar tahun 1820.

Ada dua keputusan yang dimufakati oleh para penghulu dalam musyawarah itu dan hal itu menentukan perkembangan Nagari Kurai V Jorong di masa mendatang. Pertama bahwa Bukit Kubangan Kabau, dimufakati untuk ditukar namanya menjadi Bukik nan Tatinggi. Nama ini lama kelamaan berubah bunyi menjadi Bukik Tinggi atau Bukittinggi. Nama ini kemudian juga dirajukan untuk menyebut Nagari Kurai V Jorong, sedangkan penduduk tetap

⁶⁾ Azwar Dt. Mangiang, "Hari Jadi Kota Bukittinggi, 18 Desember 1820), Makalah Seminar Hari Jadi Kota Bukittinggi (Bukittinggi: tanpa penerbit, 1988), hlm. 1-9.

⁷⁾ M. Jousra, Minangkabau : Overzicht van Land, Geschiedenis, en volk ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1923), hlm. 26.

disebut dengan urang Kurai. Sekarang urang Kurai menjadi penduduk asli kota Bukittinggi.

Kedua, bahwa para penghulu sepakat pula untuk mendirikan sebuah pasar yang dalam bahasa Minangkabau disebut pakan/balai. Pasar ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan dikenal dengan nama Pakan Kurai. Karena berada di bawah pengawasan para penghulu Nagari Kurai. Sebelum kedatangan Belanda di daerah Dataran Tinggi Agam pada tahun 1823, pasar ini telah ramai didatangi oleh penduduk nagari-nagari yang berada di sekitar Nagari Kurai.⁸⁾ Pada masa kolonial Belanda pasar ini ditumbuhkembangkan sedemikian rupa dengan melibatkan penduduk nagari Agam Tua lainnya. Sehingga pada gilirannya menjadi pakan bagi daerah Agam dan lebih dikenal dengan sebutan koto rang Agam.

4. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

Pada tahun 1925/1926 Kapten Bauer mendirikan benteng di Bukittinggi dan diberi nama Fort de Kock.⁹⁾ Ia adalah Kepala Opsir Militer Belanda di daerah Dataran Tinggi Agam. Benteng itu didirikan di atas bukit yang paling tinggi, yaitu Bukik Jirek (941 m) dan terletak sekitar 800 m sebelah barat Pakan Kurai. Sejak itu Bukittinggi secara resmi dinamakan Fort de Kock oleh pemerintah Hindia Belanda. Sungguhpun demikian masyarakat Minangkabau tetap menamakannya Bukittinggi.¹⁰⁾

Sejak berdirinya benteng de Kock, perkembangan Bukittinggi selanjutnya lebih ditentukan oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Lebih-lebih setelah Belanda berhasil memenangkan Perang Paderi pada tahun 1837 dan berkuasa di Sumatera Barat. Seiring dengan itu Belanda merubah bentuk administrasi pemerintahannya dari Residensi yang desentralisasi ke Gubernurment yang Sentralisasi. Hal ini pada gilirannya merubah pula status

⁸⁾ A. Knottenbelt, "De Rechtstoestand van de Gronden, waarop de Passer te Fort de Kock is Oppericht", KT No. 30 1941, hlm. 325.

⁹⁾ Nama de Kock diambil dari nama Baron Hendrik Markus de Kock, Komandan Militer dan Wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu. D.H. Berceer, "Aanmelding geheuden op een Reize door eenige Districten Padangsche Bovenlanden", Verhandelingen van het Koloniaal Instituut Voor Taal-, Land- en Volkunde, No. 16 (Den Haag, 1936), hlm. 181-182.

¹⁰⁾ A. Pruys van der Hoeven, Een Woord over Sumatra in Brieven Verzameld en Uitgegeven, (Rotterdam: H. Nijgh, 1864), hlm. 18.

Bukittinggi dengan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Residensi Padangsche Bovenlanden (Padang Dataran Tinggi).¹¹⁾

Adapun dalam perluasan "pemilikan" tanah di Bukittinggi ini dilakukan oleh Belanda dengan cara "meminjam" dan "membeli" kepada para penghulu Nagari Kurai V Jorong. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, ada juga yang ditentukan secara sepihak oleh Belanda. Sifat tamak pemerintah Hindia Belanda itu menimbulkan suatu ungkapan ketamakan bagi masyarakat Minangkabau. Yaitu "ba' Bulando minta tanah, diagiah sajangka nak sadepa" (seperti Belanda minta tanah, diberi sejangkal maunya sedepa).

Bukik Jirek, tempat dibangunnya benteng de Kock, merupakan tanah yang pertama sekali diberikan oleh para penghulu Nagari Kurai kepada Belanda dengan hak pakai. Peminjaman ini dilakukan dengan perjanjian bahwa Belanda juga akan membantu para Penghulu Kurai jika mendapat kesulitan.¹²⁾ Tanah ini juga dijadikan lokasi untuk membangun rumah opsir, tangsi tentara, dan kuburan Belanda.

Pada tahun 1856 Belanda meminjam lagi tanah perbukitan yang terletak di sekitar Pakan Kurai. Tanah ini dipinjamkan dengan hak pakai dan lamanya tidak ditentukan. Daerah sekitar Pakan Kurai ini akan dikembangkan oleh Belanda menjadi pusat perdagangan bagi daerah Agam dan sekitarnya. Jika tanah ini tidak diperlukan lagi, maka Belanda akan mengembalikannya kepada para penghulu Nagari Kurai.¹³⁾

Tanah ini meliputi 7 (tujuh) bukit yang bertautan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu lokasi mempunyai lembah yang sempit. Bukit-bukit itu adalah Bukit Jirek, Bukit Sarang Gagak, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cubadak Bungkuak, Bukit Bulek, Bukit Malambuag, dan Bukit Parak Kopi.¹⁴⁾

¹¹⁾ Sumatera Barat pada masa itu terdiri dari tiga residensi Padangsche Bovenlanden, Padangsche Benedenlanden, dan Tapamali. E.B. Kielstra, "Sumatra Westkust van 1836-1840", deel IV, BKJ no. 39 Tahun 1890, hlm. 193-194.

¹²⁾ Pada masa itu Kaum Paden sedang kuat-kuatnya dan setiap waktu dapat mengancam daerah Bukittinggi. Oleh karena itu perselamatan para penghulu Kurai dengan Belanda diharapkan dapat menangkis serangan Kaum Paden. M.D. Mansoer, et. al., Sedjarah Minangkabau (Jakarta: Bhratara, 1970), hlm. 133-150. lihat juga Rusli Arutan, Sumatra Barat hingga Plakat Paming (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 339-446.

¹³⁾ Mohamad Hadjerat, *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁴⁾ *Ibid.*

Secara bertahap Belanda membangun di lokasi ini berbagai prasarana untuk kepentingan kolonialnya, seperti rumah dan kantor residen, gudang-gudang kopi, los-los pasar, perkampungan Cina, India, dan Nias.¹⁵⁾ Mengikuti perkembangan ini, ketujuh bukit ini segera pula menjadi pusat kota Bukittinggi.

Daerah perbukitan itu tidak hanya dimanfaatkan untuk pengembangan pasar saja, tetapi juga untuk kepentingan pemerintahan sipil dan militer. Akan tetapi, daerah perbukitan itu tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan militer karena tidak adanya tanah yang datar dan luas. Oleh karena itu pada tahun 1861 Belanda membeli tanah di bagian selatan Bukittinggi dengan harga f.46.090,-.¹⁶⁾ Daerah ini relatif lebih datar, sehingga dapat dijadikan lapangan militer. Selain itu dibangun pula asrama militer, tangsi militer, dan rumah sakit militer.

Melihat kedudukannya semakin kuat, pada tahun 1888 Belanda secara sepihak menetapkan batas-batas daerah kekuasaannya, tanpa merundingkannya terlebih dahulu dengan para penghulu Kurai. Batas-batas yang ditetapkan oleh Belanda itu adalah :

- a. Sebelah Timur Laut dan sebelah Utara yaitu dari sebelah Barat bandar Malang melalui pancang (tiang) yang bertanda A pada jalan dekat kuburan Cina lama dengan pancang bertanda I terletak di jalan ke kampung ke Palupuh. Dan dari sini satu garis lurus lagi ke pancang (tiang) yang bertanda B yang terdapat pada jalan kecil kuburan Belanda baru.
- b. Sebelah Barat Laut, sebelah Barat dan sebelah Tenggara ialah jalan kecil (kuburan Belanda Baru) tersebut di atas sampai ke kuburan Belanda Baru. Dari sini batas sebelah Barat Daya dari kuburan Belanda tersebut sampai ke pancang bertanda D berhubungan dengan sebuah pancang berhuruf E. Berikutnya lebih kurang 240 m jauhnya di sebelah Barat jalan ke arah Padang Panjang.
- c. Sebelah Selatan, dari pancang F ditarik satu garis lurus ke arah Timur sampai dengan titik temunya jalan arah ke Padang Panjang.
- d. Sebelah Timur. Dari titik temu tersebut di atas mengalir Bandar Malang yang terbagi dua, pada bandar yang sebelah Barat sampai ke tempat pertemuan bandar ini dengan jalan Payakumbuh.¹⁷⁾

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 42-43.

¹⁶⁾ *Besluit van Gouverneur Generaal* No. 37, tanggal 5 Mei 1861".

¹⁷⁾ *Besluit van Gouverneur Generaal* No. 1, tanggal 1 Desember 1888".

Batas-batas Bukittinggi ini merupakan batas wilayah administrasi Fort de Kock yang pertama ditetapkan. Penetapan wilayah kota Bukittinggi ini, membuat pemerintah kolonial Belanda semakin berkuasa untuk mengembangkan kota Bukittinggi. Lebih-lebih setelah status administrasi kota Bukittinggi ditetapkannya sebagai sebuah Gemeente pada tahun 1918.¹⁹⁾ setahun kemudian, Gemeenteraad Bukittinggi menetapkan diberlakukannya Peraturan Sewa Tanah di wilayah Gemeente Bukittinggi. Kebijakan pemerintah kota Bukittinggi ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah penduduk kota Bukittinggi, karena dengan peraturan itu terbuka peluang untuk memiliki tanah di wilayah kota Bukittinggi. Penduduk kota Bukittinggi yang semula berjumlah 5.004 jiwa pada tahun 1920 meningkat pesat menjadi 14.657 jiwa pada tahun 1930.¹⁹⁾

Pertumbuhan penduduknya relatif sangat tinggi itu, serta merta membuat pemerintahan kota Bukittinggi memikirkan perluasannya. Sehingga, pada tahun 1930 itu juga ditetapkan perluasan kotanya. Berdasarkan penetapan batas-batas wilayah kota Bukittinggi yang baru itu, maka luas kota Bukittinggi menjadi 5,2 km².²⁰⁾ Adapun batas-batas kota Bukittinggi itu :

Sebelah Utara: Dari pancang yang bertanda A, yaitu tempat di mana jalan dari kampung Pintu Kabun berbelok ke Kampung Jirat, tepi Utara jalan yang panjangnya 1470 m menuju ke Timur sampai di pancang B (letaknya 50 m ke sebelah Timur dari tempat di mana jalan berbelok ke Selatan di atas ditarik ke Selatan panjangnya 950 m sampai jalan Bukittinggi - Payakumbuh (pancang yang bertanda C). Kemudian satu garis di tarik ke Tenggara panjangnya 1895 m, sampai di pancang yang ada sekarang dari kampung Tarok ke kampung Aur di sini bertanda C.

Sebelah Selatan: Tepi Selatan jalan yang ada sekarang dari pembelotan, pancang yang bertanda E, ke Barat yang panjangnya 555 m, sampai ke pancang yang bertanda F (tempat yang letaknya 50 m ke Barat dari Bukittinggi - Padangpanjang).

Sebelah Barat Daya dan Barat : Satu garis ditarik ke Barat Laut panjangnya 790 m ke pancang yang bertanda G, kemudian tepi Selatan jalan kecil dari pancang yang bertanda C ke pancang yang bertanda H. Kemudian

¹⁹⁾ Staatblad van Nederlandsche-Indie No. 310. Tahun 1918

¹⁹⁾ Lihat lampiran I.

²⁰⁾ Besluit van Gouverneur Generaal no. 25, tanggal 20 Mei 1930.

garis sambungan dari sambungan yang bermerek I, sepanjang pancang-pancang yang sudah ada sekarang (yaitu dari 1 sampai 9 ke pancang yang bermerek J sampai pancang yang bermerek K panjangnya sama sekali 800 m dan penghabisan tepi Barat jalan dari pancang K menuju ke Utara panjangnya 575 m sampai pancang yang bertanda A.²¹⁾

Luas kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan lagi sampai berakhirnya masa pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa pemerintah militer Jepang, Bukittinggi diadakannya sebagai kota yang strategis. Di sini ditempatkannya pusat pemerintahan Jepang untuk wilayah Sumatra. Peran besar yang dimainkan Bukittinggi ini juga menimbulkan konsekwensi bagi daerah itu dan daerah sekitarnya. Untuk dapat memenuhi berbagai fasilitasnya, maka pemerintah menetapkan luas Bukittinggi, tidak hanya seluas nagari Kutai V Jorong, tetapi juga memasukkan 11 nagari yang terdapat di sekelilingnya. Kesebelas Nagari itu adalah Nagari Gaduik, Kapau, Biaro Gadang, Ampang Gadang, Balai Gurah, Batu Tebal, Taluak, Guguak, Ladang Laweh, Koto Gadang, dan Sianok.²²⁾ Kebijakan pemerintah militer Jepang ini diikuti pula dengan menukar nama resmi Fort de Kock dengan Bukittinggi Baru.²³⁾

5. KEMASYARAKATAN

Ciri kekotaan Bukittinggi mulai tampak sejak pemerintah Hindia Belanda mendirikan benteng "Fort de Kock" pada tahun 1825/1826. Benteng ini merupakan benteng Belanda yang utama di Dataran Tinggi dalam menghadapi Kaum Paderi. Mengikuti pembangunan benteng dan sarana Garnizunnya, Pakan Kurai berkembang pula menjadi Pasar Garnizun. Bukittinggi bukan saja dikunjungi oleh para pedagang, tetapi juga oleh tukang kayu dan bangunan, pengrajin, dan buruh lainnya. Bahkan pedagang Cina dan Keling juga mendatangi Bukittinggi dari Padang. Sekitar 200-300 orang mengunjungi Bukittinggi setiap hari dan ribuan pada hari pasar, yaitu Hari Rabu dan Sabtu.²⁴⁾

Kemudian sejak tahun 1837, setelah Belanda berhasil mengalahkan kaum Paderi dan menguasai Sumatera Barat, Bukittinggi dikembangkannya menjadi

²¹⁾ Ibid.

²²⁾ Mohammad Hadjerat, Op. Cit., hlm. 27.

²³⁾ Harry J. Benda, et al., Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents (Yale University Southeast Asian Studies, 1965), hlm. 66.

²⁴⁾ Lihat Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847. Terjemahan Lilian D. Tedjasukmana (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 186.

kota kolonial.²⁵⁾ Untuk itu pemerintah Hindia Belanda membangun jalan raya, jalan kereta api, dan pasar sebagai sarana pendukungnya. Jalan raya dibangun pada tahun 1841 untuk menghubungkan Bukittinggi dengan daerah sekitarnya dan terutama dengan Padang, ibukota Sumatera Barat. Adapun jalan kereta api dibangun pada tahun 1890-an yang menghubungkan Bukittinggi dengan Payakumbuh di sebelah Timur dan Padangpanjang di sebelah Selatan serta terus ke Padang. Seiring dengan pembangunan jalan raya dan kereta api itu, sejak tahun 1850 dibangun *loods-loods* pasar, tempat permanen bagi para pedagang untuk berjualan di Bukittinggi.²⁶⁾ Perkembangan fisik Bukittinggi itu pada gilirannya menjadikannya sebagai daerah urban dan pusat perdagangan yang ramai dikunjungi. Tercatat pada tahun 1879 sekitar 14.000-15.000 orang datang ke Bukittinggi dan pada tahun 1904 meningkat menjadi sekitar 29.000 orang.²⁷⁾ Selain itu di Bukittinggi juga dibangun lembaga pendidikan Barat untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan pegawainya. Pada tahun 1846 didirikan Sekolah Nagari dan sepuluh tahun kemudian didirikan pula *Kweekschool* (Sekolah Raja).²⁸⁾ Akan tetapi, pada gilirannya sekolah ini telah melahirkan golongan intelektual Barat.²⁹⁾

Pada akhir abad ke-19 Bukittinggi tumbuh menjadi kota kolonial terpenting di pedalaman Sumatera Barat dan berkembang relatif cepat dibanding kota-kota kolonial lainnya, seperti Batusangkar, Padangpanjang, Payakumbuh, dan Solok. Hal ini disebabkan karena Bukittinggi selain dijadikan pusat perdagangan dan pendidikan. Kedua fungsi yang terakhir telah melahirkan "kelas menengah" yang menjadi kekuatan sosial dan ikut menentukan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Bukittinggi khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Dengan demikian Bukittinggi tumbuh menjadi salah satu pusat pergerakan nasional di Sumatera Barat. Pada sisi lain pertumbuhan kota Bukittinggi yang demikian pesat mencuatkannya untuk

²⁵⁾ Tentang fungsi kolonial, lihat P.J.M. Nas, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi, Bagian Pertama*, Terjemahan dan editor Sukanti Suryochoendro (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979), hlm. 17.

²⁶⁾ Sebelumnya para pedagang berjualan di tempat terbuka dan bersifat sederhana. Lihat Ishaq Thaher, et. al., *Op. cit.*, hlm. 62.

²⁷⁾ Akira Oki, "Social Change in West Sumatra Village: 1908-1945", *Ph. D. Dissertation*, Australia National University, 1977, hlm.38.

²⁸⁾ Mengenai perkembangan Sekolah Raja khususnya dan sekolah sekuler lainnya di Sumatera Barat, lihat Elizabeth E. Graves, "The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in Nineteenth Century", *Monograph Series*, Cornell Modern Indonesia Project, 1981.

²⁹⁾ Taufik Abdullah menyebut mereka dengan istilah *Schakel Society*, lihat Taufik Abdullah, "The Making of a schakel Society in the Late Nineteenth Century" dalam *Paper of the Dutch-Indonesia Historical Conference Held at Noordwijker hout the Netherlands (Leiden/Jakarta, 1976)*, hlm. 143-154.

dijadikan kotapraja pada tahun 1918.³⁰⁾ Kemudian pada tahun 1930 wilayah kota Bukittinggi pun diperluas.³¹⁾

Bagi masyarakat Minangkabau yang berada di nagari-nagari sekitarnya, Bukittinggi dianggap sebagai rantau, dan mereka disebut sebagai perantau untuk membedakannya dengan "orang Kurai", penduduk asli Bukittinggi. Mereka berada di bawah kepemimpinan seorang "penghulu dagang" atau "tamu" di Bukittinggi. Selain itu mereka juga mendirikan "surau dagang" dan "kuburan dagang" sendiri.³²⁾ Berbeda dengan perantau tradisional, mereka membawa keluarganya untuk tinggal menetap di Bukittinggi. Di sini mereka membangun keluarga inti (nuclear family) yang berbeda dengan keluarga besar (extended family) di nagari asalnya yang didasarkan kepada sistem matrilineal. Sungguhpun demikian mereka tetap mengikatkan diri dengan adat-istiadat nagari asalnya.³³⁾ Jadi, walaupun mereka berbaur dalam kota yang sama, ciri kekotaannya lebih merupakan sebagai satelit nagari-nagari daripada suatu kota yang terpadu.³⁴⁾

Pada pergantian abad yang lalu keterlibatan para pedagang semakin intens dalam pertumbuhan kota Bukittinggi. Selain berdagang hasil-hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari, mereka juga berdagang barang-barang hasil industri rumah tangga, seperti pakaian, alat pertanian dan pertukangan, perhiasan emas dan perak, dan tenunan yang berasal dari nagari mereka masing-masing. Para pedagang yang berasal dari nagari yang sama cenderung berdagang barang yang sama dan menempati *loods* yang sama pula. Sehingga, nama *loods* itu dikenal menurut nama nagari asal pedagang yang sekaligus menunjukkan jenis dagangannya. Sebagai contoh dapat ditunjukkan di sini, *loods* Kumango terdiri dari pedagang nagari Kumango yang berjualan barang pecah belah. *Loods* Sungai Puar adalah tempat orang Sungai Puar berdagang alat-alat pertanian dan pertukangan, hasil industri rumah tangga mereka.³⁵⁾ Secara singkat dapat dikatakan bahwa telah tampak spesialisasi pedagang menurut jenis dagangannya dan nagari asalnya. Bahkan mereka juga dapat menyaingi para pedagang asing,

³⁰⁾ *Staatblad van Nederlandshe Indie* No. 310, Tahun 1918.

³¹⁾ *Besluit van Gouverneur Generaal* No. 25 Tahun 1930 tanggal 20 Mei 1930.

³²⁾ Lihat Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 78; Taufik Abdullah, "Schools and Politic: The Kaum Muda Movement in West Sumatra, 1927-1933", *Monograph Series*, Cornell Modern Indonesia Project, 1971, hlm. 10; dan A.A. Navis, *Op. cit.*, hlm. 129.

³³⁾ Lihat Mochtar Naim, *Op. cit.*

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ Desa-desa atau nagari-nagari di Dataran Tinggi Sumatera Barat sudah sejak lama mempunyai industri rumah tangga. Lihat Christine Dobbin, *Op. cit.*, hlm. 14-19.

Cina dan India (Keling). Kemudian seiring dengan perkembangan Bukittinggi yang tumbuh sebagai pusat pergerakan nasional, para pedagang juga mendirikan organisasi mereka yang diberi nama "Abuan Saudagar". Pada tahun 1930 mereka merubah "Abuan Saudagar" menjadi Bank Nasional.³⁶⁾

6. KESIMPULAN

Bukittinggi terletak di tengah Dataran Tinggi Agam, yang secara tradisional disebut dengan Luhak Agam. Letaknya yang strategis ini telah menjadikannya untuk dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda mulai sebagai pusat pertahanan sampai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan untuk daerah Dataran Tinggi. Bahkan pemerintah militer Jepang menjadikannya sebagai pusat pemerintahannya di Sumatera.

Fungsi kota Bukittinggi yang demikian serta merta telah pula merubah pemilikan tanah dari hak ulayat nagari Kurai V Jorong, menjadi hak pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan individu. Selanjutnya, hal ini juga berimplikasi terhadap perubahan wilayah dan masyarakatnya dari berwajah desa menjadi kota. Perubahan ini sesungguhnya juga didukung oleh keberadaan daerah (nagari) di sekitar sebagai daerah penghasil komoditi ekspor dan industri kerajinan rumah tangga.

Fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti pasar dan pendidikan, pada gilirannya telah menelorkan golongan pedagang dan intelektual Barat. Mereka menjadi sokoguru dalam pergerakan nasional, sehingga Bukittinggi tunduk pula sebagai salah satu pusat pergerakan nasional di Sumatera Barat.

³⁶⁾ Buku Peringatan 40 Tahun Bank Nasional (Bukittinggi: PT Bank Nasional, 1970), hlm. 46-47.

Ucapan terima kasih

Alhamdulillah penulisan laporan penelitian tentang "**Kota Bukittinggi 1888 - 1942 : Studi Tentang Peradilan Pemilikan Tanah dan Perubahan Ekologi Kota**" ini telah dapat dilakukan. Terlaksananya penelitian ini telah dimungkinkan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian Universitas yang telah memberikan bantuan dana penelitian ini. Selanjutnya terima kasih disampaikan kepada pimpinan Jurusan Sejarah dan Fakultas Sastra Universitas Andalas yang telah membantu berbagai hal, termasuk kelancaran administrasi penelitian ini. Terakhir kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, kami ucapkan terima kasih. Tanpa peran serta anda semua laporan penelitian ini mungkin tidak dapat terwujud.

Sungguhpun demikian, berbagai kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini merupakan sepenuhnya adalah tanggung team peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bercer, D.H. "Aanmeking gehouden op een Reize door enige Districten Padangsche Bovenlanden", VKK, no. 16 Tahun 1936.
- Buku Peringatan 40 Tahun Bank Nasional. Bukittinggi: PT Bank Nasional, 1970.
- Besluit van Gouverneur Generaal no. 37, tanggal 5 Mei 1861.
- Besluit van Gouverneur Generaal no. 1, tanggal 1 Desember 1888.
- Besluit van Gouverneur Generaal no. 25, tanggal 20 Mei 1930.
- Dobbin, Christine. Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah, Sumatra Tengah 1784-1847. Terj. Lilian D. Tedjasukmana, Jakarta: INIS, 1992.
- Harry J. Benda, et. al. Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents. Yale University Southeast Asian Studies, 1965.
- Ishaq Thaher, et. al. Sejarah Sosial di Daerah Sumatra Barat. Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Joustra, M. Minangkabau: Overzicht van Land, Geschiedenis, en Volk. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923.
- Kielstra, E.B. "Sumatra Westkust van 1836-1841", deel IV, BKI, no. 39 Tahun 1890.
- Knottenbelt, A. "De Rechtstoestand van de Grouden, waarop de Passer te Fort de Kock is Opgericht". KI, no. 16 Tahun 1936.
- M.D. Mansoer, et. al. Sedjarah Minangkabau. Djakarta: Bhratara, 1970.
- Mochtar Naim. "Perkembangan Kota-kota di Sumatera Barat". Prisma no. 3 Tahun II, 1976.
- , Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

- Muhammad Hadjerat. "Sedjarah Nagati Kurai V Djong serta Pemerintahannya, Pasar, dan Kota Bukittinggi. Bukittinggi: Tsamaratul Ikhwani, 1947.
- Nas, P.J.M. (ed.). Issues in Urban Development : Case Studies from Indonesia. Den Haag: Leiden University, 1995.
- , Kota di Dunia Ketiga : Pengantar Sosiologi. Bagian Pertama. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979.
- Oki, Akira. "Social Change in West Sumatra Village : 1940-1945" Ph.D. Dissertation, Canberra : Australia National University, 1977.
- Rusli Amran. Sumatra Barat hingga Pakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Sartono Kartodirdjo (ed.). Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial. Jakarta: Bhratara, 1977.
- Staatsblad van Nederlandsche Indie no. 310, Tahun 1918.
- Taufik Abdullah. "Schools and Politic : The Kaum Muda Movement in West Sumatra". Monograph Series. Cornell Indonesia Project, 1971.
- , "The Making of Schakel Society in the Late Nineteenth Century" dalam PDHHCHNN. Leiden/Jakarta, 1978.
- Van der Houven, A. Pruys. Een Woord over Sumatra in Brieven verzameld en Uitgegeven. Rotterdam: H. Nijgh, 1864.